

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak, namun kami optimis bahwa melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan salah satu indikator untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami juga berharap guna peningkatan kualitas dan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini maka kami tetap mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan informasi yang kami harapkan ke seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun

2017 semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Masamba, Januari 2018

KEPALA BAPPEDA

Ir. RUSYDI RASYID, M.Si

PKT : Pembina Utama Muda IV/c

NIP :19630705 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	2
C. ISU STRATEGIS ORGANISASI	15
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. VISI DAN MISI	17
B. TUJUAN DAN SASARAN	19
C. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2017	25
B. REALISASI ANGGARAN	48
BAB. IV. PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengetahui capaian kinerja dan tingkat pencapaian target yang direncanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah direncanakan. Salah satu bentuk penilaian dan pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat dengan pelaksanaan kinerja SKPD adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Luwu

Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Visi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yaitu:

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pencapaian visi itu dengan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah khususnya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai unsur perencanaan penyelenggara pemerintah dan melaksanakan penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan penetapan visi Kabupaten seperti yang diungkapkan diatas, strategis yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah meningkatkan kompetensi dan integritas perencana dalam pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, memantapkan fungsi perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi memantapkan fungsi monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat dan teknologi informasi.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi.

Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Luwu Utara terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat;
Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 3. Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan;
Bidang Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;
 - b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - c. Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan.
- 4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
Bidang Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II; dan
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III

5. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur;
Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur I;
 - b. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur II; dan
 - c. Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur III.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan

mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Subbagian perencanaan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- b. pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan

Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai seorang Kepala bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

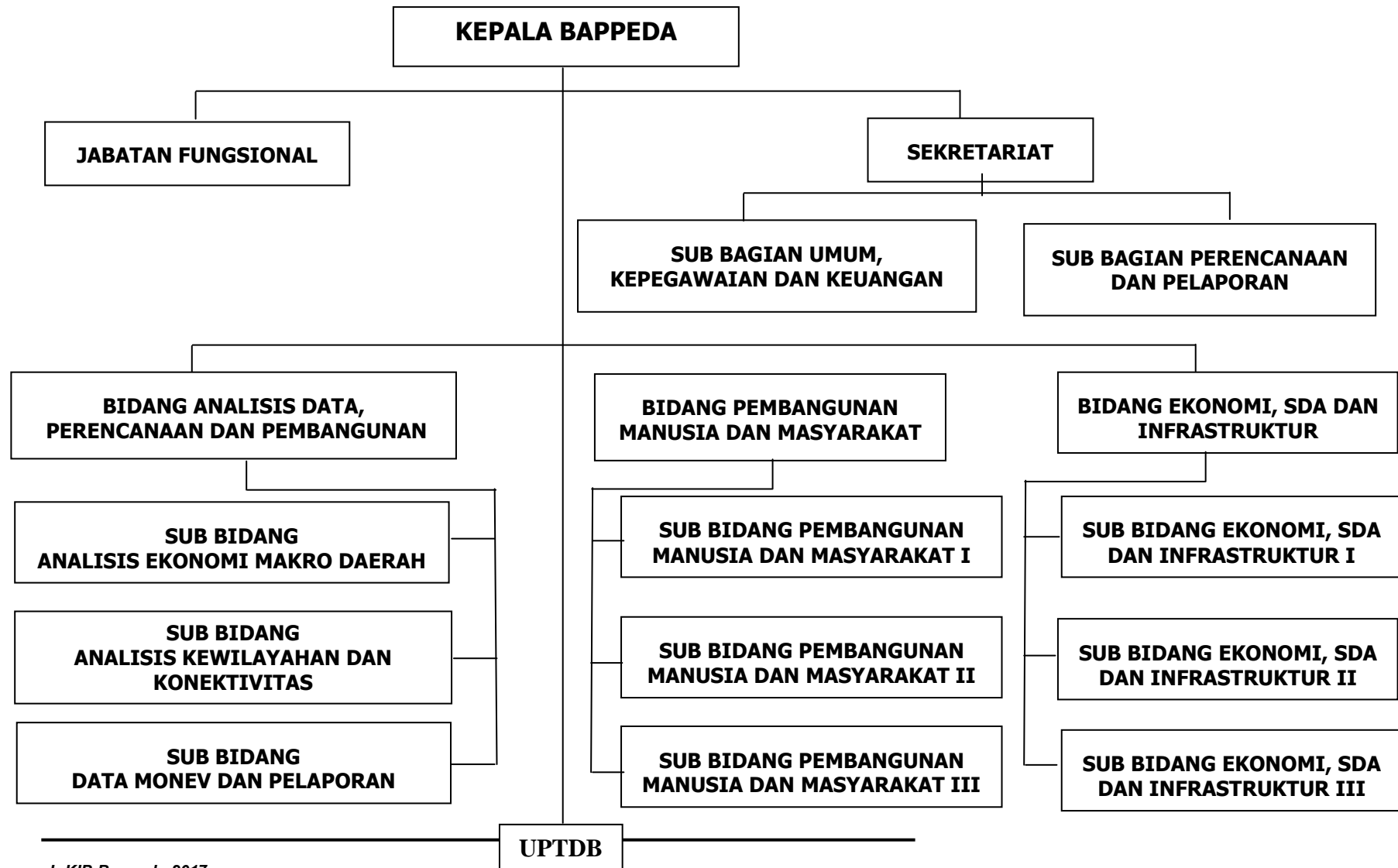
- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai bidang keahliannya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LUWU UTARA



2. Lingkungan Strategis Internal

a. Sumber Daya Manusia

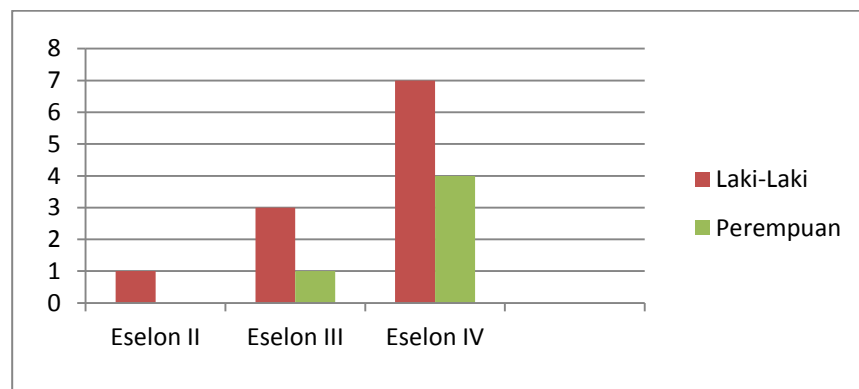
Salah satu penentu keberhasilan dari aspek strategis organisasi salah satunya dari lingkungan internal antara lain Sumber Daya Manusia. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara didukung oleh 31 Pegawai Negeri Sipil dengan kondisi pegawai berdasarkan Jabatan, golongan dan tingkat pendidikan serta jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural.

Pejabat struktural eselon II, III dan IV sebanyak 16 orang dengan rincian eselon II yaitu 1 orang laki-laki, eselon III terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, eselon IV terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural Bappeda Kab. Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Adapun susunan kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Luwu Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Bappeda
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Berdasarkan
Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingka Pendidikan

PANGKAT/ GOLONGAN	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN						TOTAL
	L	P	S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SLTP	
1. Pembina Utama Muda IV/c	1	-	-	1	-	-	-	-	1
2. Pembina Tk. I – IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pembina - IV/a	2	-	1	1	-	-	-	-	2
Jumlah	3	-	1	2	-	-	-	-	3
1. Penata Tk. I - III/d	3	3	-	-	4	2	-	-	6
2. Penata - III/c	4	2	-	1	5	-	-	-	6
3. Penata Muda Tk.I -III/b	4	1	-	-	4	1	-	-	5
4. Penata Muda - III/a	2	3	-	-	4	1	-	-	5
Jumlah	13	9	-	1	17	4	-	-	22
1. Pengatur Tk. I - II/d	2	-	-	-	-	1	1	-	2
2. Pengatur - II/c	1	1	-	-	-	-	2	-	2
3. Pengatur Muda Tk. I - II/b	1	-	-	-	-	-	1	-	1
4. Pengatur Muda - II/a	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah	5	1	-	-	-	1	5	-	6
1. Juru Tk. I - I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Juru - I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Juru Muda Tk. I - I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Juru Muda - I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	21	10	1	3	17	5	5	-	31

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Luwu Utara 2017

b. Sarana Dan Prasarana

Peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas pada Bappeda Kab. Luwu Utara sebagai berikut :

1. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa Peralatan Dapur, Meja, Kursi Tunggu, Meja Rapat, Kursi Futura;

2. Perlengkapan Gedung Kantor, sebagian besar ruangan kerja dilengkapi dengan Air Condition (AC), meja kantor, kursi kantor, lemari, rak, beberapa filing. Selain itu terdapat juga peralatan pendukung untuk kebersihan kantor.
3. Peralatan Kerja Elektronik, yakni beberapa infocus, Perangkat Computer (PC), laptop (Notebook), computer desktop, printer (laserjet, inkjet, dan dot matriks), Camera digital, LCD Projector serta seperangkat audio sebagai pelengkap ruang rapat. Juga beberapa peralatan pendukung lainnya seperti mesin ketik, dan TV.

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan tersebut di atas kemungkinan setiap tahunnya mengalami kerusakan ataupun ketidaklayakan lagi untuk dipergunakan, sehingga sewaktu-waktu perlu adanya penggantian maupun pemeliharaan yang lebih intensif agar dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas, dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal dan terukur.

C. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis organisasi merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Isu strategis sangat penting, karena berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Luwu Utara

tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Adapun isu strategis pelayanan kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Data dan informasi daerah yang bersifat dinamis dengan perubahan yang berlangsung cepat, sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan dan penyusunan data dan informasi daerah sebagai dasar dalam menyusun suatu perencanaan;
2. Perbedaan cara pandang dan metode dalam melakukan analisa terhadap data yang ada sehingga memunculkan bermacam-macam persepsi dan tafsir terhadap kondisi yang ada;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor/bidang yang membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, sedangkan di sisi yang lain tetap harus dapat menyelenggarakan tugas pokok sesuai bidang tugas masing-masing;
4. Adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah;
5. Pergantian atau mutasi aparat Bappeda sebagai motor penggerak kegiatan perencanaan yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kinerja Bappeda itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang harus menunjang aparat Bappeda yang menuntut mobilitas yang tinggi;
7. Revolusi mental yang merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visidan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang akan di capai tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada

batasan tersebut, visi Bappeda Kabupaten Luwu Utara dijabarkan sebagai berikut:

**“VISIONER, INOVATIF DAN TERUKUR DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”**

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Visioner maknanya sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki suatu cara pandang atau wawasan dalam melihat arah pembangunan Kabupaten Luwu Utara selama 5 tahun kedepan sehingga mampu menyusun suatu langkah-langkah yang strategis dalam mencapai target yang ditentukan dalam 5 tahun kedepan.
2. Inovatif dipilih sebagai metode atau tata cara yang akan dikembangkan oleh Bappeda dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Terukur yaitu dimana Bappeda diharapkan dalam membuat suatu perencanaan senantiasa berpedoman pada kaidah, norma dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penentuan besaran, dimensi maupun kapasitas.

Dikaitkan dengan Visi diatas, maka **Bappeda yang Visioner, dan Terukur dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah suatu pernyataan atau keinginan agar Aparat Bappeda Kabupaten Luwu Utara menjadi orang-orang visioner yang memiliki suatu cara pandang atau wawasan dalam melihat arah pembangunan Kab. Luwu Utara selama 5 tahun kedepan sehingga mampu menyusun suatu langkah-langkah yang strategis dalam mencapai target yang ditentukan dalam 5 tahun kedepan dan inovatif dan terukur.

Berdasarkan visi tersebut untuk mewujudkan misi pembangunan Kab. Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD 2016-

2021 terutama misi ke-satu maka ditetapkan misi RENSTRA Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, yakni :

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas perencana dalam membuat sebuah perencanaan yang berkualitas;
2. Memantapkan fungsi perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Memantapkan fungsi Monitoring dan Evaluasi berbasis masyarakat dan teknologi informasi;
4. Mewujudkan Bappeda sebagai pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time".

B. TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Bappeda Kabupaten Luwu Utara yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

Misi Pertama : "Meningkatkan kompetensi dan integritas perencana dalam membuat sebuah perencanaan yang berkualitas"	
TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan perencana yang memiliki kompetensi	1. Meninigkatnya kompetensi aparat perencana

Misi Kedua : "Memantapkan fungsi perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi"

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan traansparant	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi 2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan
	3. Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan
2. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website

Misi Ketiga : "Memantapkan fungsi Monitoring dan Evaluasi berbasis masyarakat dan teknologi informasi"

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan
---	---

Misi Keempat : "Mewujudkan Bappeda sebagai pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Bappeda sebagai Pusat Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang "real time"	1. Terwujudnya pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen/lembar yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada kepala SKPD yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini dimanfaatkan oleh Bappeda Kab. Luwu Utara untuk :

- 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- 2). Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
- 3). Menilai Keberhasilan Organisasi.

Bappeda Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Bappeda Kab. Luwu Utara
Tahun Anggaran 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP	Tepat/Tidak	Tepat
2	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif	Status Laporan Kinerja Kategori baik (Kualifikasi B)	A,B,CC,C	Kwalifikasi B
3	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang bersertifikat	Orang	2
4	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	1
5	Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase (%) penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	%	100
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	%	70
		Persentase partisipasi perempuan dalam monev	%	20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
7	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website	Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi	%	100
8	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	1. Kegiatan Musrenbang tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat
		2. Penetapan RKPD Tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat
		3. Penetapan KUA/PPAS tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat
		4. Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah	Tepat/Tidak	Tepat
		5. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan	95	95
		6. Jumlah SKPD dikoordinasikan	45	45

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Kerja Bappeda Kab. Luwu Utara
Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 757.956.900	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 185.875.000	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 65.400.000	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp 15.147.000	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Rp 32.000.000	APBD
6	Program Kerjasama Pembangunan	Rp 103.800.000	APBD
7	Pengembangan Data/Informasi	Rp 1.099.247.700	APBD
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 920.641.500	APBD
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 675.000.000	APBD
10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 142.800.000	APBD
11	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 737.000.100	APBD
12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 320.131.800	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 5.055.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengukuran capaian kinerja tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2017

A.1. REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Luwu Utara
Tahun 2016 -2021 Terhadap Target 2017

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017
1.	Jumlah aparatur perencana yang bersertifikat	Orang	2
2.	Jumlah aplikasi	Sistem	1
3.	Tersedianya dokumen perencana RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	0
4.	Tersedianya dokumen perencana RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	2
5.	Persentase (%) penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
6.	Jumlah Jenis Data dan Informasi di Website	Data	3
7.	Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi	%	100
8.	Kegiatan Musrenbag tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat
9.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat
10.	Penetapan KUA-PPAS tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat
11.	Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah	Tepat/Tidak	Tepat
12.	Persentase capaian pelaksana pembangunan	%	95
13.	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	SKPD	45
14.	Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	%	70
15.	Persentase partisipasi perempuan dalam monev	%	20
16.	Jumlah jenis data	Data	3

A.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS BAPPEDA

Pada tahun 2017, Bappeda kab. Luwu Utara telah mengukur capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Bappeda tahun 2017. Untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan tersebut terlaksana sesuai rencana guna menghasilkan Outcome dan Output kemudian dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada dokumen renstra pada sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Dalam rangka pengukuran pencapaian sasaran tersebut Bappeda Kabupaten Luwu Utara melakukan perbandingan pengukuran pencapaian sasaran yang didasarkan pada 4 (empat) kategori yakni :

Urutan	Capaian	Kategori
I	Lebih dari 100%	Sangat Tinggi
II	85% - 100%	Tinggi
III	65% - 84%	Cukup Tinggi
IV	Kurang dari 65%	Kurang

Dalam kurun waktu 2017 Bappeda Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu SKPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berikut tingkat capaian Kinerja sasaran strategis Bappeda Kab. Luwu Utara 2017

Tabel 3.2
Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja				Predikat
			0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <90	≥90	
1	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	1	-	-	-	100	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	1	-	-	-	100	Sangat Tinggi
3	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan	3	-	-	-	100	Sangat Tinggi
4	Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan	1	-	-	-	100	Sangat Tinggi
5	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website	2	-	-	-	100	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	6	-	-	-	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja				Predikat
			0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <90	≥90	
7	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	2	-	-	-	100	Sangat Tinggi
8	Terwujudnya pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	1	-	-	-	100	Sangat Tinggi

A.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

Evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara tahun 2017. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya.

Bappeda Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Sasaran 1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik
----------------------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	TARGET
Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP Opini WTP	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dengan indikator laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP dan opini WTP melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian dan Asset	Dokumen	1	1	100	1

Untuk target dari kegiatan penatausahaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset dengan indikator

terlaksananya penatausahaan keuangan administrasi kepegawaian dan asset dengan target satu dokumen yang merupakan laporan keuangan yang terdiri dari empat laporan tiap triwulan, dua laporan tiap semester dan satu laporan tahunan.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Adanya kerjasama yang baik antara ASN lingkup Bappeda.
- b) Adanya program Simda keuangan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Masih kurangnya staf dalam melakukan Verifikasi Surat pertanggung jawaban program/kegiatan.
- b) Masih kurangnya staf yang mampu mengoperasikan Simda untuk penginputan Surat pertanggung jawaban program/kegiatan.

3. Pemecahan Masalah

- a) Dalam melaksanakan verifikasi Surat pertanggungjawaban program/kegiatan dikerjakan diluar jam kerja/lembur.
- b) Perlunya penambahan staf untuk verifikasi dan pengoperasian Simda.

Sasaran 2	Terwujudnya Administrasi Pemerintahan Yang Tertib, Efisien Dan Efektif
----------------------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP BAPPEDA	A, B, CC, C dan D	B	B	100	B

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat SAKIP Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini mendapat nilai predikat B yang dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Luwu Utara dan juga sebagai evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2016 telah berupaya mencapai sasaran Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, efisien dan efektif melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan LAKIP

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen	1	1	100	1

Dan untuk target dari jumlah laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) karena ada dua dokumen yang ditargetkan yaitu Dokumen Laporan Kinerja 2016.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Laporan RFK pertriwulan dan persemester BAPPEDA dari bagian keuangan rutin dilaporkan sesuai jadwal.
- b) Komitmen pimpinan dalam mendorong penyerapan anggaran sesuai perjanjian kinerja.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

Adanya mutasi Eselon sampai staf sehingga penyesuaian dan kesinambungan data dan informasi terhambat.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Setiap adanya mutasi, bagian perencanaan segera melakukan konsultasi dan koordinasi dengan intensif pada tingkat PPTK/PPK yang baru.
- b) PPTK/PPK yang baru tetap berkomitmen terhadap time schedule yang telah disusun sebelumnya.

Sasaran 3	Meningkatnya Kompetensi Aparat Perencana
----------------------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah aparat perencanaan yang bersertifikat	Orang	2	2	100	2

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek	Orang	15	15	100	15

Capaian target indikator kinerja dalam mendukung sasaran terwujudnya profesionalisme aparat perencana Bappeda telah mencapai 33,33 persen pada tahun 2017, dimana target awal periode perencanaan berdasarkan rencana strategis/Renstra sebanyak 1 orang atau 22,22 persen dibanding jumlah target yang akan mengikuti bimtek perencanaan akhir periode perencanaan adalah 9 orang.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Minat pegawai sangat besar untuk mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat lainnya.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- Jadwal pelaksanaan diklat kadang bertepatan dengan kegiatan rutin perencanaan atau tugas pokok lainnya.
- Penjabaran terhadap peraturan perundang-undangan kadang berbeda antar pematik.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Menyesuaikan jadwal pelaksanaan diklat.
- b) Melakukan konsultasi terhadap perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan.

Sasaran 4	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan
----------------------	--

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	2	2	100	2

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan RKPD

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Dokumen RKPD 2018 dan Rancangan Perubahan RKPD 2017	Dokumen	2	2	100	2

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan melalui

beberapa indikator dan untuk indikator yaitu Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan realisasi target 100 persen dengan disusunnya dua dokumen RKPD yaitu RKPD anggaran tahun 2018 dan RKPD perubahan anggaran tahun 2017.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Adanya juknis yang mengatur dengan jelas (diatur perundang -undangan).
- b) Dikerjakan oleh tim kerja.
- c) Jadwal penetapan yang telah ditentukan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Proses pengumpulan data pendukung cukup lama.
- b) Ketepatan dalam penyelesaian dokumen dengan jadwal penetapan yang harus disinkronkan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Pengaturan staf/tim kerja dalam melakukan pengumpulan data di SKPD/lapangan
- b) Penyelesaian dokumen sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Sasaran 5

Terjaminnya Konsistensi Dokumen Perencanaan

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Persentase (%) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan RKPD

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Dokumen RKPD 2018 dan Rancangan Perubahan RKPD 2017	Dokumen	2	2	100	2

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan melalui indikator persentase (%) penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dengan realisasi target 100 persen dengan disusunnya dua dokumen RKPD yaitu RKPD anggaran tahun 2018 dan RKPD perubahan anggaran tahun 2017 yang memuat evaluasi realisasi capaian renstra sampai dengan tahun 2017 masing-masing perangkat daerah/SKPD.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Adanya juknis yang mengatur dengan jelas (diatur perundang-undangan).
- Dikerjakan oleh tim kerja.
- Jadwal penetapan yang telah ditentukan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Proses pengumpulan data pendukung cukup lama.
- b) Ketepatan dalam penyelesaian dokumen dengan jadwal penetapan yang harus disinkronkan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Pengaturan staf/tim kerja dalam melakukan pengumpulan data di SKPD/lapangan
- b) Penyelesaian dokumen sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Sasaran 6	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
----------------------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	%	70	70	100	75
Persentase partisipasi perempuan dalam monev	%	20	20	100	25

Untuk pelaksanaan Monitoring Evaluasi yang merupakan tugas pokok Bappeda dilaksanakan harus dilaksanakan tiap tahun dengan jangka waktu pelaksanaan tiap per triwulan pada tahun berkenaan atau pelaksanaan.

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dengan dua indikator yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam

monitoring dan evaluasi pembangunan dan persentase perempuan/keterwakilan perempuan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk Capaian kinerja jumlah persentase partisipasi masyarakat yang ikut dalam monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten untuk tahun 2017 adalah 70 persen. Dan untuk indikator persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah 20 persen. Dan pencapaian target dari indikator tersebut adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali/Triwulan	4	4	100	4

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dengan indikator jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan target 4 kali/triwulan telah tercapai sesuai target atau terealisasi 100 persen.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Partisipasi masyarakat dalam mengikuti monev dikecamatan cukup tinggi
- b) Keterlibatan masyarakat dan lembaga dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Ketersediaan data Laporan Kegiatan yang masih terlambat dari Organisasi Perangkat Daerah.

- b) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam menghadiri monev.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Peningkatan komitmen Organisasi Perangkat Daerah.
b) Melibatkan BKMT, PKK, dan Organisasi wanita lainnya.

Sasaran 7	Meningkatnya Pembangunan	Fungsi	Pengendalian	Pelaksanaan
--------------	-----------------------------	--------	--------------	-------------

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Kegiatan Musrenbang tepat waktu	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat
Penetapan RKPD tepat waktu	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat
Penetapan KUA PPAS tepat waktu	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat
Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah	Tepat/ Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat
Persentase capaian pelaksanaan pembangunan	%	95	95	100	95
Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	SKPD	45	45	100	45

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas sasaran melalui beberapa indikator dan untuk indikator pertama yaitu kegiatan musrenbang tepat waktu realisasi target tepat waktu atau 100 persen. Untuk indikator yang kedua yaitu dokumen penetapan

RKPD tepat waktu dengan realisasi target tepat waktu atau 100 persen. Untuk indikator ketiga yaitu penetapan KUA-PPAS tepat waktu dengan realisasi tepat waktu atau 100 persen. Indikator yang keempat yaitu ketepatan pemanfaatan ruang wilayah dengan realisasi tepat atau 100 persen. Untuk indikator yang kelima yaitu persentase capaian pelaksanaan pembangunan dengan realisasi 95 persen atau 100 persen dari target. Dan untuk indikator jumlah SKPD yang dikoordinasikan dengan realisasi 45 atau 100 persen dari target.

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Tahap	4	4	100	4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang difasilitasi oleh Bappeda adalah salah satu tahap yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 untuk menerima usulan dari SKPD Kabupaten Luwu Utara dalam perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2017. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD telah dilaksanakan tepat waktu dengan waktu melaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu pada minggu kedua bulan maret.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah dokumen RKPD 2018 dan Rancangan Perubahan RKPD 2017	Dokumen	2	2	100	2
Jumlah dokumen KUA Tahun 2018 dan KUA-P 2017	Dokumen	2	2	100	2
Jumlah dokumen PPAS Tahun 2018 dan PPAS-P 2017	Dokumen	2	2	100	2

Untuk Kegiatan Penyusunan penyusunan rancangan RKPD ada tiga indikator untuk sasaran meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan yaitu penetapan 2 dokumen RKPD tepat waktu yaitu RKPD tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017 dan perubahan RKPD tahun 2017 pada tanggal 31 Juli 2017 dan indikator penetapan KUA/PPAS tepat waktu dengan adanya nota kesepahaman DPRD Kab. Luwu Utara dengan Bupati Luwu Utara pada tanggal 14 November 2017 untuk KUA/PPAS tahun anggaran 2018 dan tanggal 22 September 2017 untuk KUA/PPAS perubahan tahun anggaran 2017.

Penetapan KUA dan PPAS yang tepat waktu yang kemudian berdampak terhadap penetapan RAPBD menjadi Perda APBD 2018 lebih cepat di banding tahun sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2017 lebih cepat dibandingkan dengan penetapan APBD tahun sebelumnya yakni pada tanggal 25 November 2016. Adapun jumlah target yang dimaksud adalah KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2018 dan KUA dan PPAS perubahan APBD 2017).

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Adanya juknis yang mengatur dengan jelas (diatur perundang-undangan).
- b) Dikerjakan oleh tim kerja.
- c) Jadwal penetapan yang telah ditentukan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Proses pengumpulan data pendukung cukup lama.
- b) Ketepatan dalam penyelesaian dokumen dengan jadwal penetapan yang harus disinkronkan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Pengaturan staf/tim kerja dalam melakukan pengumpulan data di SKPD/lapangan
- b) Penyelesaian dokumen sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

3. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rencana Tata Ruang Wilayah

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah dokumen teknis rencana tata ruang wilayah Kab. Luwu Utara	Dokumen	1	1	100	1

Untuk Sasaran meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan indikator ketepatan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi rencana tata ruang wilayah dengan indikator Jumlah dokumen teknis rencana tata ruang

wilayah Kab. Luwu Utaradengan target 1 dokumen telah tercapai sesuai target atau terealisasi 100 persen.

4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah Rapat Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Kali	6	6	100	4

Untuk Sasaran meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan indikator jumlah SKPD yang dikoordinasikan capaian targetnya dapat dinilai dari beberapa program/kegiatan diantaranya yaitu Kegiatan koordinasi perencanaan pembangun bidang ekonomi dengan indikator jumlah rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan target 6 kali telah tercapai sesuai target atau terealisasi 100 persen.

5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah Koordinasi terhadap SKPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	SKPD	14	14	100	14
Jumlah Koordinasi pendampingan program (AMPL, Wash, Wish, STBM)	Laporan Tahunan	1	1	100	1
Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial (PSKS, PKH)	Jenis	2	2	100	2

Kegiatan koordinasi pembangunan bidang sosial budaya dengan indikator jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dan target 14 SKPD telah tercapai sesuai target atau terealisasi 100 persen. Kegiatan koordinasi bidang sosial budaya adalah salah satu kegiatan pencapaian sasaran di bappeda yaitu meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan indikator jumlah SKPD yang dikoordinasikan.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a) Adanya data-data pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah.
- b) Adanya dukungan pemerintah pusat, provinsi maupun Daerah.
- c) Tersedianya dukungan dan program/kegiatan.
- d) Adanya kerjasama dari tim, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- e) Adanya komitmen antara pemangku kepentingan.
- f) Koordinasi antar lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah terjalin dengan baik.
- g) Tersedianya sarana dan prasarana budidaya Kakao.
- h) Keterlibatan dari para petani yang maksimal terkait pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi.
- i) Adanya sinergitas program antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.
- j) Adanya dokumen peninjauan kembali (Dokumen PK)

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- a) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah dalam pengumpulan data yang kurang maksimal.

- b) Perkembangan dalam hal pemanfaatan ruang sudah tidak sesuai dalam RTRW kabupaten.
- c) Kerjasama belum menunjukkan kemajuan yang signifikan terutama tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.
- d) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air bersih di Desa tidak berfungsi secara maksimal.
- e) Pelaporan program Millenium Challenge American-Indonesia (MCAI) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara belum terlaksana secara berkala.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- a) Peningkatan komitmen Organisasi Perangkat Daerah terkait ketersediaan data.
- b) Penyediaan lahan untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau.
- c) Adanya MoU dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
- d) Revisi RTRW.
- e) Peningkatan intensitas kerjasama.
- f) Penyediaan dana operasional Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Bersih.
- g) Peningkatan koordinasi dengan MCAI.
- h) Membentuk tim Revisi RTRW yang beranggotakan SKPD teknis yang di SK kan

Sasaran 8	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
----------------------	---

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Persentase partisipasi masyarakat dalam moneyv	%	65	65	100	70
Persentase partisipasi perempuan dalam moneyv	%	20	20	100	25

Untuk pelaksanaan Monitoring Evaluasi yang merupakan tugas pokok Bappeda dilaksanakan harus dilaksanakan tiap tahun dengan jangka waktu pelaksanaan tiap per triwulan pada tahun berkenan atau pelaksanaan.

Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017 telah berupaya mencapai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dengan dua indikator yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dan persentase perempuan/keterwakilan perempuan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk Capaian kinerja jumlah persentase partisipasi masyarakat yang ikut dalam monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten untuk tahun 2017 adalah 65 persen. Dan untuk indikator persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah 20 persen. Dan pencapaian target dari indikator tersebut adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)	TARGET
Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali/Triwulan	4	4	100	4

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dengan indikator jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan target 4 kali/triwulan telah tercapai sesuai target atau terealisasi 100 persen.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Partisipasi masyarakat dalam mengikuti monev dikecamatan cukup tinggi
- Keterlibatan masyarakat dan lembaga dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi

- Ketersediaan data Laporan Kegiatan yang masih terlambat dari Organisasi Perangkat Daerah.
- Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam menghadiri monev.

3. Strategi Pemecahan Masalah

- Peningkatan komitmen Organisasi Perangkat Daerah.
- Melibatkan BKMT, PKK, dan Organisasi wanita lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bappeda
Kab. Luwu Utara Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan jasa surat menyurat	- 1000 pucuk	996.000,00	994.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- 12 Bulan	8.300.000,00	8.277.827,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	- 3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	4.245.000,00	2.944.540,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- 1 Org Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- 4 Jenis (Lampu, Kabel, Stop Kontak, Fitting)	2.500.000,00	2.495.000,00
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	- 10 Jenis	16.185.000,00	16.180.000,00
	Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah	- 35 Orang	530.130.900,00	529.711.799,00
	Penatausahaan keuangan, adm	- 8 Dokumen	183.600.000,00	182.450.000,00

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
	kepeg. & asset			
2	Program Peningkatan sarana & Prasarana aparatur			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- 1 Jenis	10.000.000,00	9.999.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	- 3 Jenis (PC all in one, Laptop, Printer)	116.000.000,00	110.569.500,00
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- 1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- 3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	30.875.000,00	30.875.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- 5 Jenis (Komputer, Laptop, Printer, Mesin Ketik dan AC)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	- 3 Jenis (Lemari, Meja Kerja &Meja Rapat)	3.000.000,00	2.999.850,00
3	Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur			
	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	- 15 Orang	65.400.000,00	64.419.566,00

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
4	Program Peningkatan Pengemb. Laporan Kinerja			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- 1 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- 2 Dokumen	11.397.000,00	11.377.000,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan			
	Kunjungan Kerja Bersama Bupati / Wakil Bupati / DPRD / Muspida / Pejabat Pemerintah Tingkat Atas / Unit Kerja Terkait	- 8 Kali	32.000.000,00	31.945.000,00
6	Program Kerjasama Pembangunan			
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- 1 Laporan	36.000.000,00	35.872.200,00
	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	- 8 kali	67.800.000,00	60.122.000,00

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
7	Program pengembangan data/informasi			
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	- 1 Dokumen	59.641.000,00	53.378.000,00
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	- 5 Data	158.575.000,00	142.831.000,00
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rencana Tata Ruang Wilayah	- 1 Dokumen	881.031.600,00	871.006.600,00
9	Program perencanaan pembangunan daerah			
	Penyusunan Rancangan RKPD	2 Dokumen	224.239.600,00	212.652.171,00
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- 1 Dokumen	231.855.000,00	230.612.947,00
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	- 1 Dokumen	25.281.900,00	25.281.900,00
	Monitoring, evaluasi	- 4 Kali Triwulan	439.265.000,00	421.764.400,00

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
	dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan			
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi			
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	- 2 Dokumen	65.800.000,00	57.351.000,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	- 6 Kali	486.600.000,00	473.391.677,00
	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	- 10 Dokumen	122.600.000,00	121.471.000,00
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar			
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	- 1 Dokumen	142.800.000,00	137.677.050,00
12	Program perencanaan sosial dan budaya			
	Koordinasi Perencanaan	- 14 SKPD (Forum SKPD,	394.442.250,00	387.861.750,00

No	Nama Kegiatan	Capaian	Jumlah (Rp)	
			ALOKASI	REALISASI
	pembangunan bidang sosial budaya	Klinik Konsultasi SKPD Bidang Sosial Budaya)		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- 12 Kecamatan dan 1 Kabupaten	143.636.450,00	143.194.800,00
	Fasilitasi penguatan kelembagaan pembangunan manusia dan masyarakat	- 1 Kegiatan	198.921.400,00	143.194.800,00
14	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
	Fasilitasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur	- 4 Kali	320.131.800,00	297.342.500,00

Adapun tingkat efesiensi anggaran dengan Realisasi Belanja persasaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Analisa Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis
Belanja Barang dan Jasa Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2017

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kompetensi Aparat perencana	65.400.000	64.419.566	98,50	100	101,52	Sangat Efisien
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	1.231.756.600	1.196.409.600	97,13	100	102,95	Sangat Efisien
3	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan	235.636.600	224.029.171	95,07	100	105,18	Sangat Efisien
4	Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan	1.646.695.450	1.535.461.977	93,25	100	107,24	Sangat Efisien
5	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib dan efektif	531.126.800	530.705.799	99,92	100	100,08	Sangat Efisien
6	Terwujudnyapenge lolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	243.241.000	235.828.000	96,95	100	101,88	Sangat Efisien
7	Tersedianya data informasi pembangunan melalui website	-	-	-	100	-	Sangat Efisien
8	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	608.183.350	590.241.100	97,05	100	103,04	Sangat Efisien

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meingkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	231.855.000	230.612.947	99,46	100	100,54	Sangat Efisien

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2017. LAKIP ini disusun menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Kemudian dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 telah dapat dipenuhi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh sasaran strategis.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan kedepan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM perencana.
2. Peningkatan teknologi, metode dan sistem perencanaan pembangunan.
3. Penyusunan dan penjadwalan yang ketat yang bertujuan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2017 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara bagi pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

secara keseluruhan yaitu untuk **Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal.**